BAB II

BIOGRAFI DAN PEMIKIRAN FARAG FOUDA

A. Riwayat Pendidikan dan Karir

Farag Fouda (فرج فوده) kadang-kadang ditulis Faraj Foda, Faraj Fowda, Farag Foda adalah seorang pemikir, penulis, aktivis Hak Asasi Manusia dan kolumnis terkemuka Mesir. Nama lengkapnya Farag Ali Fouda. Ia lahir di Danietta dekat Delta Nil, pada tanggal 20 Agustus 1945 dan meninggal pada tanggal 8 Juni 1992 dalam usia 46 tahun.[1] Dia memiliki dua putra dan dua putri. Secara formal, pendidikan Farag Fouda bukanlah pendidikan yang bersentuhan langsung dengan wacana keislaman. Dia merupakan doktor bidang ekonomi dan pertanian.[2] Ia memperoleh gelar *Bachelor* (sarjana) Pertanian pada bulan Januari tahun 1967. Pada tahun 1975, Fouda memperoleh gelar *Master of Science* dalam bidang Pertanian dan Ph.D di bidang ekonomi pertanian dari Universitas Ain Syams pada tahun 1981 dengan judul disertasi *Iqtisadiyat Tursyidu Istikhdama Miyah al Ray fi Misr*.[3]

---

[1] Wikipedia, *Farag Fouda*, https://en.m.wikipedia.org/wiki/Farag_Fouda, diakses pada hari senin tanggal 04 September 2017

[2] Farag Fouda, *Al-Haqiqah Al-Ghaibah, terj. Novriantoni dengan judul "Kebenaran yang Hilang: Sisi Kelam Praktik Politik dan Kekuasaan dalam Sejarah Kaum Muslim",* edisi digital, (Jakarta: Democracy Project Yayasan Abad Demokrasi, 2012), p. ix

[3] Alex Madani, *Studi Analisis Pandangan Farag Fouda tentang Hubungan Agama dan Negara dalam Siyasah Syar'iyyah, (*Medan: Prodi hukum, Program Pasca Sarjana IAIN Sumatera Utara, 2014*)*, p. 42

Aktivitas sehari-hari Fouda adalah sebagai pengajar di Universitas ‘Ainu Syams. Selain itu ia merupakan politisi, aktivis sosial dan HAM yang sering berbicara tentang kekebasan berpikir dan berekspresi yang seumur hidupnya dihabiskan untuk menangkis upaya penerapan syariat Islam secara formal dalam negara dan pendirian *Khilafah Islamiyah*. Fouda juga merupakan seorang pemilik saham sekaligus pimpinan pada Perusahaan Investasi Fouda.[4]

Semasa perjalanan hidupnya, Fouda juga pernah berafiliasi dan aktif dalam dunia politik. Dia pernah berafiliasi dengan Partai Wafd dan Partai Istiqlal. Tetapi ia lebih dikenal sebagai pemikir, penggiat hak asasi manusia dan komentator sosial.[5] Pada tahun 1984, ia meninggalkan Partai *al-Wafd* setelah mereka memutuskan untuk berkolaborasi dengan Ikhwanul Muslimin dalam pemilihan parlemen. Fouda berseberangan dengan Sheikh Salah Abu Ismail ayah dari pemimpin Salafi, Hazem Abu Ismail tentang nasib partai tersebut yang dikenal dalam kalangan politik. Desakan Abu Ismail untuk mengubah Wafd yang sekuler adalah alasan utama Fouda keluar dan memutuskan untuk mendirikan partainya sendiri: *The Future (Masa Depan).*[6] Hingga kematiannya, Partai Mustaqbal (The

---

[4] Alex Madani, *Studi Analisis Pandangan*..., p. 43

[5] Farag Fouda, *Al-Haqiqah Al-Ghaibah*..., p. ix

[6] Sara Abou Bakr, *“Farag Fouda; Assassination of the Word”,* Artikel *Daily News Egypt*, 8 Juni 2013, https://dailynewsegypt.com/2013/06/08/farg-fouda-assassination-of-the-word/. Diakses pada hari Selasa tanggal 05 September 2017

Future) belum mendapatkan izin dari pemerintah Mesir.[7]Selain mengajar di Universitas ‘Ainu Syams, aktifitas dan karir Farag Fouda yang sangat dominan dalam bidang gerakan sosial keagamaan. Ini dibuktikan dengan kegigihannya dalam melakukan kritik-kritik sosial pada masanya. Dia banyak menulis buku dan berkontribusi sebagai kolumnis majalah Mesir Oktober. Fouda menulis pada masa kebangkitan Islam dan meningkatnya pengaruh Islamisme, baik yang kekerasan dan tanpa kekerasan.[8]

Sebagaimana kita ketahui bersama, Mesir merupakan pusat peradaban Islam yang sangat masyhur. Dengan Al-Azhar sebagai lokomotif dan laboratorium intelektual telah melahirkan banyak gagasan dan pemikiran yang dikeluarkan oleh para alumnusnya. Melihat latar belakang seperti itu, maka sudah menjadi suatu kewajaran kalau Mesir menjadi pusat berkembangnya pengetahuan khususnya dalam wacana-wacana keilsaman. Pembaharuan-pembaharuan dalam diskursus dan wacana pemikiran Islam yang bernuansa progresif lahir di tanah ini. Perkembangan peradaban dan pesatnya kemajuan zaman mendorong para cendekiawan Islam untuk mengakses konsep dan gagasan baru dalam dunia Islam sendiri. Bagaimana konsep tentang kepemimpnan, konsep negara, konsep ekonomi modern dan sebagainya menjadi landasan bagi

---

[7] Alex Madani, *Studi Analisis Pandangan*..., p. 43

[8] Wikipedia, *Farag Fouda*, https://en.m.wikipedia.org/wiki/Farag_Fouda, diakses pada hari senin tanggal 04 September 2017

para pemikir modern melahirkan gagasan tersebut walau harus berhadapan dengan sekelompok yang mengaku paling Islami. Semangat itulah yang melahirkan pemikiran-pemikiran Fouda, dia melihat ada ketidak sinergian antara kemajuan zaman dengan gagasan yang ditawarkan oleh kelompok Islamis tersebut. Dalam benak Fouda apa yang dikampanyekan oleh sebagaian kalangan Islamis di Mesir yang mengaku sebagai wakil tuhan pada saat itu hanyalah alat kepentingan untuk mencapai kekuasaan politik saja. Bagi Fouda prinsip menghargai perbedaan, egaliter dan kompetitif merupakan pola yang sangat ideal terlebih dalam menyoal kepemimpinan tanpa memandang agama, ras dan golongan.

B. Seputar Kematian Farag Fouda

Pada tanggal 8 Juni 1992 Farag Fouda ditembak mati oleh dua orang bersenjata bertopeng yang mengendarai sepeda motor di luar kantornya di Nasr City di luar Kairo. Kedua pria bersenjata dilaporkan telah memantau gerakan Farag Fouda dan mengawasi rumahnya di daerah al-Nuzha di Heliopolis selama beberapa minggu. Farag Foda baru saja hendak membuka pintu mobilnya ketika salah satu penyerang memberondong dia, anaknya Ahmad (15 tahun), dan temannya, Wahid Ra'fat Zaki, dengan peluru. Sopir Fouda kemudian mencoba untuk mengejar para penyerang dan bertabrakan dengan mobil lain serta sepeda

motor tersebut. Orang-orang yang berkumpul di sana berhasil menangkap salah satu pelaku penyerangan, sementara yang lainnya berhasil melarikan diri.[9]

Beberapa hari sebelum dibunuh, tanggal 3 Juni, sekelompok ulama Al-Azhar mengeluarkan pernyataan bahwa Fouda, berdasarkan fikiran dan tulisannya, telah menghujat agama dan karenanya keluar dari Islam. Ini berarti, ia adalah musuh Islam dan halal darahnya. Disini, labelisasi halal berarti boleh dibunuh. Sebelumnya, kelompok ulama yang sama menerbitkan daftar nama-nama orang yang memusuhi Islam dan Fouda berada diurutan pertama.[10]

Dalam pandangan masa kini, pembunuhan yang dilakukan terhadap Fouda merupakan salah satu catatan kelam dalam sejarah demokrasi dan kebebasan berekspresi manusia. Fouda dibunuh oleh sekelompok masyarakat Mesir yang menamakan dirinya sebagai Jama'ah Islamiyah yang merasa bahwa gagasan Fouda dalam membangun semangat demokrasi dan keterbukaan akan menghalangi misi politik mereka pada saat itu. Dalam hal lain, pembunuhan Fouda merupakan ironi dalam tatanan demokrasi Mesir pada saat itu. Pembunuhan Fouda tidak dapat dibenarkan sekalipun dia dibunuh oleh orang Islam. Karena sejatinya Islam sangat melarang umatnya untuk saling membunuh.

---

[9] Alex Madani, *Studi Analisis Pandangan*..., p. 46-47
[10] Farag Fouda, *Al-Haqiqah Al-Ghaibah*..., p. x

Yang menjadikan pembunuhan ini begitu menggetarkan masyarakat adalah bahwa pembunuhan Farag Fouda bukanlah proses yang mendadak dan instan, melainkan pembunuhan yang dirancang dan diskemakan. Boleh jadi keputusan pembunuhan Fouda telah diambil beberapa bulan sebelumnya. Pada bulan Januari 1992, berlangsung debat hebat dalam rangka pameran buku Kairo. Ada dua kubu yang berdebat. Yang satu terdiri dari Fouda dan Muhammad Ahmad Khalafallah (lahir 1926) dan kubu yang lain terdiri dari Muhammad Al-Ghazali (1917-1996), Ma'mun Al-Hudaibi dan Muhammad Imara. Konon 30.000 orang menghadiri debat yang sempat difilmkan tetapi tidak penah ditayangkan ke publik.[11] Perdebatan dan perang Ideologis di Mesir pada saat itu membawa Fouda kepada jurang kematian yang tidak seharusnya terjadi.

Para pembunuh Fouda adalah pemuda-pemuda yang tidak lulus perguruan tinggi dan mereka mencari nafkah serabutan sebagai pekerja yang tidak terampil.[12] Pembunuhan Fouda tidak bisa terlepas dari peran ulama Mesir pada saat itu. Pada gilirannya ulama pun memainkan perannya. Al-Azhar tidak mengutuk pembunuhan Fouda. Ma'mun Al-Hudaibi, pimpinan Ikhwanul Muslimin membenarkan pembunuhan tersebut. Ketika menjadi saksi kasus pembunuhan Fouda, Muhammad al-Ghazali mengatakan seorang Muslim yang telah murtad atau keluar dari

[11] Farag Fouda, *Al-Haqiqah Al-Ghaibah...*, p. x
[12] Farag Fouda, *Al-Haqiqah Al-Ghaibah...*, p. xii

agama Islam dapat dibunuh. Ketika ditanya siapa yang akan melaksanakan pembunuhan tersebut, maka jawabannya adalah pemerintah; tetapi dapat dilakukan siapa saja jika pemerintah tidak bertindak.[13]

Dan lebih amat disayangkan bahwa salah satu dari eksekutor Fouda adalah orang yang tidak bisa membaca. Hal ini bisa kita lihat dalam salah satu wawancara yang dikutip dari tulisan Sara abou Bakr dalam Daily News Egypt. Selama persidangan salah satu pembunuhnya, yang terakhir ditanya mengapa dia membunuh Fouda, yang dia jawab: “karena bukunya”. Ketika ditanya buku Fouda mana yang dia baca, si pembunuh menjawab: "Saya tidak tahu bagaimana membaca".[14] Namun karena doktrin dan dogma dalam kalangan Jama’ah Islamiyah dia mampu memanipulasi hal tersebut. Mungkin dalam pandangan dan doktrinnya mereka percaya bahwa ini merupakan pekerjaan yang diperintahkan oleh Allah.

Pada tahun 2012, salah seorang terpidana pembunuhan Farag Fouda, Abu al-A’la Abd al-Rabuh diberikan grasi beserta dengan 500 orang terpidana lainnya oleh Presiden Mesir, Muhammad Mursi. Setahun kemudian, pada tanggal 14 Juni 2013, salah satu televisi swasta Saudi Arabia, *Al-Arabiya* berhasil mewawancarai Abd al-Rabuh. Dalam wawancara tersebut Abd al-Rabuh sama sekali tidak menyesali

---

[13] Farag Fouda, *Al-Haqiqah Al-Ghaibah...*, p. xiii
[14] Sara Abou Bakr, *“Farag Fouda; Assassination ...,*

perbuatannya terhadap Fouda dan anak-anaknya yang ditinggalkan, bahkan Abd al-Rabuh menjustifikasi bahwa apa yang dilakukannya adalah hal yang benar dan mesti dilakukan terhadap orang yang telah menghina Nabi Muhammad, istri dan para sahabatnya. Menurut Abd al-Rabuh, hukum bagi orang yang menghina Nabi adalah murtad, dan orang yang murtad halal darahnya ditumpahkan. Sebenarnya ini adalah tugas pemerintah, namun jika pemerintah tidak mengambil tidakan berdasarkan syariat, maka siapa saja boleh melakukan eksekusi. Berikut adalah transkip lengkap wawancara Abd Al-Rabuh:[15]

> "***Pewawancara***: Apa pembenaran agama untuk pembunuhan Farag Foda?
> ***Abu Al-'Ela Abd Rabbo***: Hukuman untuk murtad adalah maut, bahkan jika dia bertobat. Jika seseorang mengutuk Allah atau Nabi di depan umum, dia harus dihukum mati. Hukuman untuk murtad adalah kematian.
> ***Pewawancara***: Siapa yang dipercayakan dengan melakukan hukuman ini?
> ***Abu Al-'Ela Abd Rabbo***: Jika ada penguasa Muslim yang adil - atau bahkan orang tirani yang menerapkan hukuman yang ditentukan oleh Allah - dia harus melakukan hukuman ini. Tapi jika bukan itu masalahnya, dan penguasa tidak menerapkan syariah, warga manapun berhak melakukan hukuman Allah.

---

[15] Memri TV, *"Egyptian Islamist Justifies His Assassination of Secularist Intellectual Farag Foda in 1992",* Transkip, https://www.memri.org/tv/egyptian-islamist-justifies-his-assassination-secularist-intellectual-farag-foda-1992/transcript, Video Youtube, https://www.memri.org/tv/egyptian-islamist-justifies-his-assassination-secularist-intellectual-farag-foda-1992. Diakses pada hari Selasa Tanggal 05 September 2017

> ***Pewawancara***: Bagaimana dengan anak-anak Farag Foda, yang melihat Anda sekarang menikmati kebebasan Anda? Tidakkah kamu menghormati perasaan mereka? Lagi pula, Anda membunuh ayah mereka.
> ***Abu Al-'Ela Abd Rabbo***: Dengan segala hormat, Anda harus berhenti menggunakan metode berbisa ini, yang ditujukan untuk memancing sentimen para penonton
> ***Pewawancara***: Ini bukan metode berbisa
> ***Abu Al-'Ela Abd Rabbo***: Sebelum Anda membicarakan keluarga Foda, saya bertanya kepada Anda apakah Anda tidak dilukai oleh seseorang yang mengutuk Nabi dan istrinya? Apa yang memberi Anda rasa sakit dan duka yang lebih besar? Jika Anda mengatakan bahwa itu adalah Farag Foda, maka Anda harus memeriksa kembali iman Anda. Tapi jika Anda mengatakan itu adalah serangan terhadap Nabi, istri-istrinya, dan al-Qur'an, maka Anda telah menjawab pertanyaan Anda sendiri."

Kematian Fouda menyisakan luka yang dalam bagi dunia intelektual. bahkan putri sulungnya samar mempertanyakan pembunuhan ayahnya dengan menantang para pembunuhnya untuk menunjukan bukti dari tulisan ayahnya yang melawan Islam. "Ayah saya adalah pemikir Islam dalam arti penuh dan dengan sepenuh hati membela Islam moderat. Saya menantang pembunuhnya jika mereka bisa menemukan teks tunggal dalam tulisannya melawan Islam".[16] Dalam menghormati kematian Fouda, beberapa forum liberal mesir menggelar uapaca penghormatan kepada

[16] Ramadan Al Sherbini, *Slain Egyptian Anti-Islamist Writer Faraj Fouda Remembered*. Artikel tanggal 12 Juni 2013, http://gulfnews.com/news/mena/egypt/slain-egyptian-anti-islamist-writer-faraj-fouda-remembered-1.1196122, diakses pada tanggal 05 September 2017

Fouda yang dijuluki sebagai *"Martir Pencerahan"*.[17] Beberapa kesan pasca kematian Fouda disampaikan oleh penulis di Mesir, salah satunya Baha Taher. Menurutnya bahwa cara berfikir Fouda masih menginspirasi. Dan sebagai bentuk penghormatannya, Baha Taher memberikan sanjungan kepada Fouda "Dia adalah seorang pemikir yang berani mengungkapkan pandangannya dan berdiri teguh melawan perang amoral yang terus membidiknya bahkan lebih dari dua dekade setelah kematiannya".[18]

Melihat siapa aktor dan dalang dalam tragedi pembunuhan Fouda, seharusnya ini tidak terjadi. Apalagi seorang Fouda hanya mencoba memberikan gagasan dan kemajuan berfikirnya dalam mensikapi kondisi politik Mesir saat itu. Terlebih Fouda hanya menjadi antitesa dari pendapat sekelompok Islam di Mesir yang terus mengkampanyekan berdirinya formalisasi syari'at Islam di Mesir pada saat itu.

Jelas kematian Fouda disebabkan oleh perkawinan antara dugaan salah dan klaim kebenaran sepihak oleh sekelompok orang yang mengharuskan manusia merengguh nyawa. Mereka merasa diri paling benar dengan telah melakukan tindakan pembunuhan terhadap Fouda. Kegiatan seperti ini dianggap bahaya karena akan melahirkan disparitas dan keutuhan hidup berbangssa dan bernegara. Menurut Syafi'i Ma'arif bahwa persoalan seperti di atas adalah sebuah bahaya. Jika sekedar merasa

---

[17] Ramadan Al Sherbini, *Slain Egyptian...*,
[18] Ramadan Al Sherbini, *Slain Egyptian...*,

paling benar tanpa menghukum pihak lain, barangkali tidaklah terlalu bahaya. Bahaya akan muncul bilamana ada orang yang mengatasnamakan tuhan lalu menghukum dan bahkan membinasakan keyakinan yang berbeda.[19]

Kematian Fouda merupakan gambaran bahaya yang disampaikan diatas. Sejatinya tindakan pembunuhan seperti itu tidak bisa dibenarkan. Karena sejatinya Al-Qur'an sendiri adalah kita yang toleran. Dan Al-Qur'an lebih jauh sangat toleran daripada tindakan segelintir orang yang melakukan kekerasan bahkan pembunuhan yang mengatasnamakan tuhan itu sendiri.

C. Pemikiran Farag Fouda

Semasa hidupnya Farag Fouda dikenal sebagai seorang aktifis penggiat Hak Asasi Manusia. Fouda juga adalah seorang yang menjunjung nilai-nilai demokrasi dan kebebasan pada masanya. Selain itu, Fouda juga dikenal sebagi seorang sekuleris dalam melihat konsep dan realitas Negara-Agama saat itu. Hal ini terlihat dari beberapa tulisannya yang acapkali mengkritik kalangan Fundamnetalis Islam saat itu. Farag Fouda menilai bahwa gerakan kaum Fundamentalis Islam yang terus

---

[19] Abdurrahman Wahid, *Ilusi Negara Islam, Ekspansi Gerakan Islam Transnasional di Indonesia*, edisi digital, cet. ke-I (Jakarta: Desantara Utama Media, 2009), p. 7-8

mengkampanyekan formalisasi syarii'at Islam hanyalah instrumen kepentingan politik kelompok mereka saja. Dalam pandangan Fouda bahwa konsep kepemimpinan dan negara yang ditawarkan oleh kalangan fundamentalis tidak memiliki instrumen politik yang jelas dan gamblang dalam menjawab persoalan modern saat ini. Dari sekian tokoh sekularis Mesir, Fouda adalah salah satu yang sangat terbuka melakukan kritik terhadap pandangan kelompok Islamis. Hal ini bisa dilihat dari tulisannya yang menimbulkan kontroversi, dan tetap saja dengan desakannya bahwa negara sekuler akan lebih baik melayani Islam daripada negara agama (penerapansyari'at Islam). Itulah pendiriannya bahwa pendirian negara agama atau formalisasi syari'at islam akan membawa kediktatoran atas nama agama.[20] Berikut adalah beberapa pemikiran Farag Fouda tentang konsep kepemimpinan dan negara:

1. Institusi Khilafah

Dalam melakukan kritik terhadap pandangan dan tafsiran kaum islamis, ia tidak semata-mata mengungkapkan fakta sejarah yang menurutnya telah hilang dari memori mereka. Ia sering menggunakan fakta tersebut untuk menunjukan keadaan yang bertolak belakang dari yang di fahami lawan debatnya.[21]

---

[20] Sara Abou Bakr, *"Farag Fouda; Assassination ...,*
[21] Farag Fouda, *Al-Haqiqah Al-Ghaibah* ..., p. xvi

Dalam hal institusi khilafah yang sering dikampanyekan oleh kalangan islamis di Mesir pada saat itu, Fouda menilai bahwa itu hanyalah alat kampanye politik dengan mengatasnamakan agama belaka. Selebihnya konsep yang ditawarkan dalam gagasan pendirian kembali institusi khilafah atau formalisasi syari'at Islam, bagi Fouda kalangan islamis telah melupakan catatan sejarah kelam institusi khilafah itu sendiri. Fouda hanya menganggap bahwa itu hanyalah unit politik kalangan islamis belaka. Tentang sejarah khilafah pada periode salaf yang oleh kalangan islamis dianggap sebagai periode keemasan yang dirindukan umat islam, Fouda justru menganggap periode itu merupakan periode yang biasa saja. Malah ada banyak jejak memalukan. Dalam merespon hal ini Fouda menjelaskan

> Tentang anggapan mengenai keutamaan institusi khilafah sebagai unit politik umat islam, yang melandasi keinginan menegakan kembali institusi khilafah, Fouda mengedepankan fakta-fakta yang dilupakan perspektif romantis terhadap khilafah. Ada banyak khalifah, baik dari sejarah dinasti Umayah maupun Abbasiyah yang brengsek, brutal dan biadab. Pendiri dinasti Abbasiyah yang dijuluki "si Penjagal", mengundang 90 anggota keluarga Umayah makan malam dan menyiksa sebelum membunuh mereka. Kebiasaan para khalifah yang buruk dan hedonis seperti gemar minum minuman keras, main perempuan, dan berprilaku seksual menyimpang, adalah beberapa contoh yang dikemukakan Fouda dari sejarah panjang kekhilafahan.[22]

[22] Farag Fouda, *Al-Haqiqah Al-Ghaibah* ..., p. xviii

Lebih lanjut pembahasan tentang sisi kelam institusi khilafah akan dikupas lebih tuntas dalam bab selanjutnya. Ini hanya salah satu contoh kecil fakta sejarah tentang khalifah yang coba dipaparkan oleh Fouda.

Dalam persoalan konsep negara, Allah Swt tidak mengatur secara rinci, Al-Qur'an hanya mengatur secara global tentang konsep politik dan negara. Perintah nyata yang jelas termaktub dalam kitab suci hanyalah perintah Allah Swt kepada manusia untuk menjadi seorang khalifah dalam surat surat Al-Baqrah ayat 30.

وَاِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَئِكَةِ اِنِّيْ جَاعِلٌ فِى الأَرْضِ خَلِيْفَة

"Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat:"Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah dimuka bumi ini". (QS. Al-Baqarah Ayat 30)

Tidak ada ayat dalam kitab suci yang menjelaskan secara rinci bahwa kita diwajibkan mendirikan negara khilafah dan menerapkan formalisasi syari'at islam dalam bernegara secara ekplisit. Semua sistem yang lahir dari pola kenegaraan yang ada merupakan ijtihad politik manusia dari masing-masing generasi dengan menyesuaikan kondisi dan situasi pada masanya, begitupun dengan konsep institusi khilafah. Yang menjadi tolak ukur islami atau tidaknya suatu negara adalah bilamana negara bisa menjamin rasa keadilan terhadap seluruh

umat dan masyarakatnya. Tanpa harus memandang konsep sebuah negara itu adalah demokrasi, monarky atau institusi khalifah sekalipun. Selama konsep-konsep tersebut bisa melahirkan keadilan dan kesejahteraan bagi umat dan masyarakat, maka kita sepakat bahwa negara tersebut sudah islami. Karena sejatinya yang menjadi landasan tentang keberhasilan dalam proses islamisasi adalah keadilan.

Mengenai justifikasi kalangan islamis yang menganggap bahwa merekalah wakil tuhan dimuka bumi ini, ini merupakan calim teologis semata. Karena pada dasarnya Fouda dan tokoh lain yang memiliki pemikiran serupa dengan Fouda juga berangkat dari kalangan muslim sendiri. Mengenai fenomena seperti ini, Gusdur pernah memberikan komentar nya sebagai berikut:

> Tentang klaim-klaim implisit aktivis garis keras bahwa mereka sepenuhnya memahami maksud kitab suci, dan karena itu mereka berhak menjadi wakil Allah (*Khlaifat Allah*) dan mengusai dunia ini untuk memaksa siapapun mengikuti pemahaman "sempurna" mereka, sama sekali tidak bisa diterima baik secara teologis maupun politis. Mereka benar bahwa kekuasaan hanya milik Allah. (*La hukm Illa Li Allah*), tetapi tak seorang pun yang sepenuhnya memahami kekuasaan Allah Swt. Karena itu Nabi bersabda, "*Kalian tidak tahu apa sebenarnya hukum Allah*". Ringkasnya sekalipun didasarkan kepada Al-qur'an dan Sunnah, fiqh-yang lazim digunakan sebagai justifikasi teologis kekuasaan oleh mereka-sebenarnya

> adalah hasil usaha manusia yang terikat dengan tempat, waktu, dan kemampuan penulis fiqih yang bersangkutan.[23]

Memang harus kita akui bahwa penerapan konsep formalisasi syari'at dalam institusi khilafah hanya merupakan hasil ijtihad manusia semata. Dengan slogan kembali kepada islam, saatnya islam bangkit, tegakan syariat islam yang dikampanyekan oleh kalangan islmis seolah-olah menunjukan bahwa umat islam pasca periode salaf dan berhentinya institusi khilafah adalah umat yang jahiliyah, umat yang tidak faham islam dan manusia-manusia yang belum tercerahkan. Padahal kita sadari bahwa realitasnya bertolak belakang, perkembangan peradaban islam pasca periode tersebut mengalami kemajuan yang begitu pesat baik dalam segi ekonomi, politik dan pengetahuan. Justru slogan-slogan tersebut lebih mengisyaratkan akan kepentingan politis ketimbang kepentingan agama.

Andaikan apa yang dikampanyekan oleh kelompok islamis itu adalah suatu kebenaran, sudah barang tentu terdapat kelemahan-kelemahan tersendiri dalam metodologi penerapannya dalam masa kini. Dalam dunia dan peradaban modern seperti sekarang ini akan sulit rasanya untuk kita bisa menerima konsep pengangkatan seorang khilafah untuk mewakili seluruh muslim di dunia ini. Pertanyaan

---

[23] Abdurrahman Wahid, *Ilusi Negara Islam..., p. 18-19*

mendasar yang akan muncul adalah siapa yang akan diangkat menjadi khalifah ? Darimanakah orang tersebut berasal ? siapa yang berhak malakukan baiat terhadap khalifah ? Pertanyaan-pertanyaan itu akan muncul secara alamiah saat kita melihat realitas hari ini. Bagaimana tidak, sejauh keyakinan kita berasumsi bahwa tidak ada satu pun negara sekalipun itu negara mayoritas muslim menyerahkan kedaulatannya secara cuma-cuma kepada orang yang nanti akan diangkat menjadi khalifah yang kita masih bingung bagaimana cara baiatnya. Dunia sudah modern, peradaban sudah maju, maka Islam lahir untuk menjawab itu semua tanpa menghilangkan spirit dan prinsip-prinsip kemajuan itu sendiri.

Lebih lanjut Fouda mempertanyakan jika memang institusi khilafah akan kembali didirikan dan mengikuti metode zaman dahulu, bagaimana cara khilafah akan mengatasi persoalan-persoalan kontemporer yang paling dekat dengan masyarakat seperti kredit perumahan, bank konvensional, dan sebagainya. Maka bagi Fouda, khilafah dalam sejarahnya tak lebih dari sistem kekuasaan totaliter yang berselubung agama. Ia mempertanyakan label “Islam” khilafah dan berusaha menunjukian bahwa yang sering tampak dari sejarah politik Islam justru hal-hal yang berlawanan dengan Islam. Karena ia memisahkan Islam dari praktik kekuasaan atas nama Islam, maka

praktek khilafah dalam sejarah dapat dikritik, dicela dan dibahas menggunakan tolak ukur ilmu politik, demokrasi dan hak asasi manusia.

Selain kesulitan-kesulitan yang akan dihadapi diatas, dalam catatan sejarah, bentuk kekhalifahan pun tidak luput dari para pemberontak dan imitatif. Seperti yang dicatat diawal dalam kitab Tarikh Al-Khulafa karya Imam As-Suyuthi. Walaupun kitab ini menceritakan perjalanan panjang seputar kekhilafahan akan tetapi yang dicatat hanya seputar zaman Khulafaur Rasyidin sampai dinasti Abbasiyah dan beberapa dinasti kecil, karena selebihnya mereka yang mengklaim diri sebagai institusi kekhalifahan, dengan berbagai alasan tidak dibahas karena tidak diakui status kekhalifahannya. "Didalam buku ini saya mengesampingkan mereka yang mengaku-ngaku sebagai khalifah padahal sebenarnya adalah pemberontak. Misalnya mayoritas golongan Alawiyin dan sebagian golongan Abbasiyin.".[24] Lebih lanjut bahwa gagasan atau ide tentang pendirian institusi khilafah pada masa sekarang merupakan satu hal yang tidak sesuai dengan teori-teori Islam sendiri. Karena dalam Islam sendiri adala hadis yang meriwayatkan bahwa jika khilafah telah sampai kepada

[24] Imam As-Suyuthi, *Tarikh Khulafa, terj. Muhammad Ali Nurdin dengan judul: "Tarikh Khulafa: Sejarah Para Khalifah"*, (Jakarta: Qisti Pres & Al-Azhar Pres, 2015), p. 12

Bani Abbasiyah, tidak akan lepas khilafah itu dari mereka sampai diserahkan kepada Isa ibn Maryam tau al-Mahdi. Karena itu, jika ada yang mengaku-ngaku sebagai khilafah, jelas ia adalah pemberontak.[25]

Dari keterangan di atas, bahwa sebuah hadits meriwayatkan bahwa seharusnya orang-orang Abbasiyah lah yang menjadi khilafah sampai datangnya Al-Mahdi. Kita boleh berasumsi kalaupun memang hari ini harus kembalinya institusi khilafah, sudah barang tentu khilafah tersebut harus lahir dan berasal dari kelompok Abbasiyah sendiri sampai nanti Al-Mahdi datang sebagai khalifah dan juru selamat terakhir umat manusia. Tapi realitas berkata lain, bahwa kita sudah sepakati bersama bahwa dinasti Abbasiyah sudah runtuh sekitar tahun 1258 M/656 H pada masa akhir kekhilafahan Al-Mu'tasim Billah.[26]

Dalam Al-Qur'an kewajiban mendirikan institusi khilafah yang ditawarkan oleh kalangan Islamis tidak tertulis secara eksplisit. Al-Qur'an hanya mewajibkan kepada umat Islam untuk memiliki pemerintahan/negara (ulil amri) dan wajibnya menggunakan hukum dengan hukum-hukum yang diturunkan Allah Swt. Sebagai mana Allah berfirman dalam Al-Qur'an *"Wahai orang-orang yang*

---

[25] Imam As-Suyuthi, *Tarikh Khulafa..., p. 14*

[26] Mujib, *"Runtuhnya Dinasti Abbasiyah"*, Artikel Pustaka Pribadi, Oktober 2012, https://pustakailmudotcom.wordpress.co/2012/10/25/runtuhnya-dinasti-abbasiyah/

beriman, taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasul-Nya dan ulil amri di antara kalian".[27]

Konsep negara yang digunakan pasca berakhirnya periode kekhalifahan Rasulullah Saw, Khulafaur Rasyidin, Dinasti Umayah dan Dinasti Abbasiyah selama dalam proses perjalanan negara tersebut dalam menegakan keadilan dan kemaslahatan umat tidak bertentangan dengan ajaran Islam yang bersumber kepada Al-Qur'an, Al-Hadits, Ijma' dan Qiyas adalah sah. Karena kalaupun umat harus mendirikan kembali institusi khilafah, kita akan menunggu datangnya Al-Mahdi yang akan menjadi khalifah terakhir dengan konsep negara institusi khilafah. Karena dalam hadits hanya Al-Mahdi lah satu-satunya yang ditunggu oleh umat Islam untuk menjadi khilafah terakhir, bukan manusia-manusia seperti kita ini. Sebagaimana hadits meriwayatkan:

> "Sungguh bumi ini akan dipenuhi oleh kedzhaliman dan kesemana-menaan. Dan apabila kedzhaliman dan kesemena-menaan telah penuh, maka Allah akan mengutus seorang laki-laki yang berasal dari umatku (dalm hadits lain keturunanku), namanya seperti namaku, dan nama bapaknya seperti nama bapak ku. Maka ia akan memenuhi bumi dengan keadilan dan kemakmuran, sebagimana telah dipenuhi sebelum itu oleh kedhzliman dan kesemana-menaan. Di waktu itu langit tidak akan menahan sedikitpun tetesan airnya, dan bumi tidak akan menahan dari tanaman-tanamannya. Maka ia akan hidup

[27] QS. An-Nisa ayat 59

bersama kamu selama 7 tahun 8 bulan, dan paling lama 9 tahun".[28]

Dari hadits di atas kita telah mendapat kabar, bahwa sekalipun akan kembali berdiri kekhalifahan dan akan adanya khalifah di muka bumi ini ialah ketika dunia sudah bnar-benar berada dalam puncak kedzhaliman dan kesemena-menaan dimana-mana. Islam sudah tidak bisa tegak, hukum Allah sudah benar-benar hilang, ketidakadilan merajalela, ajaran Islam sudah tidak diterapkan. Dan khalifah tersebut adalah Al-Mahdi, bukan orang lain ataupun organisasi/harokah yang getol dan gigih mengagas pendirian institusi khilafah.

2. Kepemimpinan Dari Golongan Quraisy

Dalam pesoalan penunjukan kepemimpinan, ada baiknya kita kembali melihat sejarah bahwa Rasulullah Saw tidak pernah menunjuk siapa yang akan menggantikan beliau pasca beliau mangkat. Tentu hal ini bukanlah karena Rasulullah tidak tau siapa sahabat yang pantas menggantikannya pasca beliau wafat. Bahkan selama masa pemerintahan Khulafaur Rasyidun, para khalifah tidak pernah menunjuk siapa khalifah pengganti pasca mereka. Ada banyak hadits yang meriwayatkan hal demikian. Bahwa Al-Hakim meriwayatkan dalam Al-Mustadrak dan dinyatakan shahih oleh Imam

[28] Hadits Riwayat Tabrani, Al Bazzar dan Abu Nu'aim. Disahihkan oleh Imam As-Suyuthi dan Al Jami' dan disetujui kesahihannya oleh Al Bani

Al-Baihaqi dalam Dala'ilun Nubuwwah dari Abu Wa'il. Ia berkata bahwa kepada Ali pernah ditanyakan, "Tidakkah engkau menentukan pengganti untuk memimpin kami ?" Ali menjawab, "Rasulullah tidak memutuskan siapa penggantinya untuk kami. Namun, jika Allah menhendaki kebaikan, Dia akan menghimpun manusia kepada sosok terbaik diantara mereka sebagaimana Dia telah menghimpun perkara ini kepada insan terbaik setelah Nabi mereka".[29]

Keputusan Rasulullah diatas bisa kita asumsikan, bahwa Rasulullah menyerahkan masalah siapa pemimpin yang akan memimpin umat kepada umat itu sendiri dan tentunya atas kehendak Allah SWT tanpa memandang siapa dan dari mana pemimpin itu berasal. Kita bisa simpulkan bahwa Rasulullah Saw merupakan manusia yang sangat menghargai semangat demokrasi dan memegang erat semangat egalitarianisme.

Akan tetapi ada beberapa hadits yang menyatakan bahwa pemimpin atau khalifah itu harus berasal dari Golongan Quraisy. Sebagaimana yang ditulis dalam Tarikh Khulafa Imam As-Suyuthi sebagai berikut:[30]

---

[29] Imam As-Suyuthi, *Tarikh Khulafa...*, p. 15
[30] Imam As-Suyuthi, *Tarikh Khulafa...*, p. 16-17

a) Abu Dawud Ath-Thayalisin dalam Musnad-nya menulis bahwa Sakin ibn Abdil Aziz berkata dari Yaser Ibn Salamah, dari Abu Barzah, bahwa Rasulullah Saw bersabda,

الأئِمّةُ مِنْ قُرَيْشٍ اِذَا حَكَمُوْا عَدَلُوا, اِذَا عَاهَدُوا وَفَّوْا وَاِدْسْتُرْحِمُوْا رَحِمُوْا

"Para imam berasal dari Quraisy. Jika memimpin mereka pasti adil. Jika berjanji mereka pasti menepati. Jika dimintai kasih sayang mereka pasti memberi." ***(HR. Imam Ahmad dan Abu Ya'la dalam Musnad mereka, juga Imam At-Thabrani)***

b) Al-Bazzar berkata, "Ibrahim ibn Hani' berkata kepada kami, Al-Faidh ibn Fadhl berkata kepada kami, Mis'ar berkata kepada kami, dari Salamah ibn Kuhail, dari Abu Shadiq, dari Rabi'ah ibn Makid, dari Ali ibn Abi Thalib bahwa rAsulullah bersabda:

الأَمَرَاءُ مِنْ قُرَيْشٍ, اَبْرَارُهَا أَمَرَاءُ اَبْرَارِهَا, وَفُجَّارُهَا أَمَرَاءُ فُجَّارِهَا

"Para pemimpin itu berasal dari Quraisy yang baik akan memerintah yang baik, yang jahat akan memerin tah yang jahat."

Mengenai masalah kepemimpinan yang dalam fiqih siyasah terdapat hadits bahwa pemimpin harus berasal dari Suku Quraisy, Fouda menilai hadits ini tidak lebih dari justifikasi terhadap kekuasaan dinasti Umayah dan Abbasiyah. Terhadap ulama dan para pendukung penegakan kembali khilafah, yang masih menerima ajaran hadits ini sebagai syarat khilafah, Fouda menulis "Karena itu, ada

baiknya bila para pendukung konsep khilafah di zaman modern ini menunjukan kepada kita cara bagaimana menentukan nasab kita. Siapa tahu kita adalah orang-orang Quraisy tanpa sengaja. Dengan modal itu, kita bisa pula berkecimpung di dunia politik , mengincar kekuasaan, dan mencampakan akal fikiran".[31]

Menjadi suatu asumsi yang wajar saat Fouda menganalisis bahwa hadits-hadits yang menyatakan kepemimpinan atau khalifah harus dari golongan Quraisy sebagai justifikasi terhadap kekuasaan dinasti Umayah dan dinasti Abbasiyah semata dan kelompok tertentu yang mencoba "menjual hadits" demi kepentingan dan hasrat politiknya. Karena harus kita sadari dalam peradaban modern saat ini, kita sebagai umat Islam akan merasa bingung dengan hadits-hadits atas syarat-syarat wajibnya pemimpin dari golongan Quraisy, walaupun dengan dalih mempertahankan dan mewarisi peradaban fiqih Islam . Karena yang kita tahu bahwa Islam merupakan agama yang egaliter, agama yang menjunjung tinggi persamaan hak tanpa mebeda-bedakan kelompok atau suku. Tidak ada satu klausul yang mengharuskan bangsa Arab (Quraisy) lebih mulia ketimbang bangsa lain. Dimata Islam semua manusia sama mau itu darah merah atau darah biru, yang meninggikan derajat manusia bukanlah kaum,

[31] Farag Fouda, *Al-Haqiqah Al-Ghaibah* ..., p. xix-xx

popularitas atau prestasi nya, melainkan bentuk ketaqwaan kepada allah SWT. Dari hadist tesebut diatas, ada beberapa analisis yang coba akan kita bahas.

Pertama, kita harus yakin bahwa manusia yang paripurna dan dijamin maksum oleh Allah SWT hanyalah Rasulullah Saw, selebihnya tidak ada manusia yang mendapatkan predikat maksum.

Kedua, bagaimana caranya kita mengakses keturunan golongan Quraisy dalam zaman yang sudah modern dengan berbagai bangsa yang mengisi dunia ini. Dan andaikan bisa diakses kemana golongan Quraisy berdiaspora dan siapa saja, yang jadi masalah selanjutnya metode seperti apakah yang akan diambil dalam menentukan sang keturunan Quraisy yang akan menjadi khalifah/pemimpin.

Ketiga, seandainya hanya hadits ini saja yang dijadikan patokan, bagaimana dengan golongan lain yang kapasitasnya dan integritasnya dalam memimpin bisa melebihi apa yang dikuasi oleh Quraisy tersebut. Karena sekali lagi kita tegaskan kalau semua orang yang berasal dari golongan Quraisy seperti Rasulullah semua, maka niscaya perdebatan ini akan segera selesai. Dan hal itu adalah suatu kemustahilan dalam jangkauan nalar kita.

Maka dapat diwajarkan ketika Fouda melancarkan kritik keras terhadap orang-orang yang meiliki nafsu kekuasaan yang amat berlebih dengan berlindung dengan hadits tersebut. Fouda pernah mengisahkan tentang kesalahan kalangan Islamis dalam melakukan manipulasi hadits ini sebagai berikut:

> Syarat ini sengaja diletakkan untuk menjustifikasi kepemimpinan kaum Umayyah dan Abbasiyah. Sebab semuanya memang dari suku Quraisy. Bahkan, imajinasi kita akan sampai pada kisah sejarah terbaru tentang Raja Faruq pada masa awal kepemimpinannya. Saat itu, ia disodorkan kepada rakyat Mesir dengan citra sebagai raja yang saleh. Karena itu, ia selalu tampil berjenggot lengkap dengan tasbihnya di depan khalayak. Dengan cara itu, sebagian tokoh agama yang ambisius segera saja menahbiskannya sebagai raja atau imam bagi umat Islam. Mereka yang cerdik segera mereka-reka hubungan antara nasabnya dengan nasab Rasulullah. Media massa segera mengumumkan dan memastikan ketersambungan nasabnya itu (kendati sudah pasti bahwa kakek dari ayahnya adalah Muhammad Ali Pasha, seorang Albania, dan kakek dari ibunya adalah Sulaiman Pasha, seorang keturunan Prancis). Itu semua dilakukan untuk memenuhi syarat bagi seorang pemimpin sebagaimana yang tertulis dalam kitab-kitab fijih. Fungsi lainnya adalah untuk membungkam para penentangnya. Perasaan anda mungkin sama dengan saya: kurang nyaman dengan syarat yang menggolongkan orang Islam kedalam kelompok darah biru (yaitu orang-orang Quraisy yang berkuasa) dengan kelompok darah merah (yaitu rakyat kebanyakah). Akan tetapi, mereka segera saja mengemukakan hadits Nabi yang terpercaya, yang mensyaratkan seorang imam berasal dari suku Quraisy. Benak anda juga akan langsung dijejali hadits-hadits serupa yang sengaja dinuat-buat oleh imitator hadits. Hadits-hadist seperti

> ini sebetulnya dibuat oleh orang-orang yang tidak beragama dan yang sangat berambisi menggombal penguasa. Mereka tidak punya hati nurani apalagi keyakinan yang pasti. Namun untuk menentangnya, anda tetap kecut hati karena akan dituduh sebagai orang yang memusuhi Sinnah Nabi. Tuduhan itu terutama akan datang dari kalangan yang mempelajari hadits hanya sebatas aspek sanadnya, bukan isi dan kesesuaiannya dengan teka al-Qur'an.[32]

Dalam perjalanan panjang sejarah peradaban Islam, kita telah disuguhkan berbagai metode dalam pemilihan pemimpin, baik itu pemilihan langsung atau tidak langsung. Sampai saai ini berbagai negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam masih memakai metode pemilihan atau peralihan kepemimpinan dan konsep pemerintahan yang berbeda dari masa ke masa. Yang artinya selalu ada persyaratan baru yang lebih ketat dalam persoalan memilih pemimpin sesuai dengan kondisi dan kebutuhan daerah serta masyarakatnya.

3. Pemisahan Antara Agama dan Negara

Seperti yang sudah disebutkan dibab awal, bahwa dalam dunia modern ini hubungan antara agama (Islam) dan negara setidaknya memiliki 3 paradigma yaitu paradigma integralistik, paradigma simbiotik dan paradigma sekuleristik. Dalam hal ini, Fouda memiliki

---

[32] Farag Fouda, *Al-Haqiqah Al-Ghaibah...*, p. 21

paradigma sekuleristik atau pemisahan antara agama dan negara dalam memandang konsep hubungan agama (Islam) dan negara.

Fouda menganut prinsip pemisahan politik dari agama, antara negara dan agama Islam. Menurutnya pemisahan ini perlu dilakukan demi kebaikan agama dan negara. Agama terhindar dari manipulasi politisi, dan pemerintahan terlaksanakan tanpa beban partikularisme keagamaan. Selaras dengan ini fouda menentang penerapan syari'at karena menurutnya penerapan syari'at hanya akan mengarah ke negara keagamaan (*daulah diniyyah*). Ia menentang segala bentuk kerahiban dan kekudusan dalam dunia politik karena kehidupan politik didasarkan atas kepentingan dan keharusan sosial.[33]

Tentang wacana dan paradigma sekuleristik ini menarik untuk kita analisis. Dalam perjalanan Islam modern ini, paradigma seperti ini tidak hanya terjadi dalam diri Fouda di Mesir saja, akan tetapi di beberapa negara yang mayoritas muslim lain pun juga sama. Seperti di Turki yang merupakan negara dengan mayoritas Muslim pun memakai paradigma sekuler akan tetapi melihat catatan M. Dawan Rahardjo dalam bukunya Budhy Munawar Rachman, Turki telah melakukan kesalahan dengan melanggar prinsip dasar sekulerisme.

---

[33] Farag Fouda, *Al-Haqiqah Al-Ghaibah* ..., p. xx-xxi

> Di Turki, negara memang telah dipisahkan dari agama. Kekhalifahan Islam yang pernah membawa Turki ke puncak peradaban dunia itupun telah dihapuskan dan diganti dengan negara sekuler. Dewasa ini, di Turki ada peraturan melarang anggota keluarga pejabat negara yang perempuan untuk memaki jilbab, sehingga PM Erdogan harus mengungsikan anak perempuannya ke AS, yang juga walaupun negara sekuler, namun tidak mau mencampuri masalah keyakinan pribadi. Dalam hal ini, sebenarnya Turki yang sekuler itu telah melanggar sendiri prinsip sekulerisme itu. Hal ini lebih tanpak ketika Turki melarang azan dalam bahasa Arab untuk digantikan dengan bahasa Turki. Ini lebih nampak lagi sebagai pelanggaran asa pokok sekulerisme.[34]

Dalam Memahami paradigma sekulerisme hubungan antara agama dan negara, kita harus memakai sudut pandang kebangsaan. Bahwa yang menjadi prinsip dasar sekulerisme adalah di satu pihak menghendaki kebebasan dan hak-hak sipil, dan dipihak lain menghendaki persatuan dan kesatuan. Karena pada dasarnya yang menjadi pondasi dasar dalam sekulerisme bukanlah kesamaan, melainkan perbedaan. Bagaiamana sekulerisme bisa mengintegrasikan perbedaan-perbedaan yang ada dengan pandangan yang lebih luas menuju kepada spirit persatuan sendiri. Dalam hal ini setidaknya sekulerisme memiliki tiga inti pandangan hidup berkaitan dengan agama, yaitu pertama, kebebasan beragama, berkepercayaan dan menjalankan ibadah bagi setiap warga. Kedua, keadilan terhadap

[34] Budhy Munawar Rachman, *Sekularisme, Liberalisme dan Pluralisme: Islam Progresif dan Perkembangan Diskursusnya*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2010), p. xxvii

setiap agama dan aliran kepercayaan, sepanjang tidak melanggar konstitusi, hukum dan kesepakatan sosial dalam norma-norma moral dan kesusilaan. Ketiga, toleransi dalam interaksi antar kepercayaan dan praktek-praktek peribadatan.[35]

Menurut Fouda, mengingkari sistem sekuler berarti tidak mengenal perkembangan zaman, sementara mengaitkan sifat kafir pada sistem sekuler berarti tidak mengenal demokrasi itu sendiri. Di lain pihak, menyeru kepada Negara Agama artinya tidak mengenal hak-hak asasi manusia, dan ajakan mendirikan Khilafah Islamiyah berarti tidak mengenal sejarah kekhalifahan itu sendiri.

Dalam format hubungan agama dan negara fouda berpendapat sebagai berikut:

ان انصار العامانية يرون فصلا بين الدين و الدولة اما بقدر شامل و كامل و اما بقدر محدود .يقصر الفصل على امور السياسة و شئون الحكم ,وفى المقابل يرى اعداؤها ان الفصل مستحيل ,و ان الخلط فريضة دينية ,و أن الإسلام دين و دولة .و أن من يقبل بالدين و يرفض الدولة إنما ينكر معلوما من الدين بالضرورة.

[35] Budhy Munawar Rachman, *Sekularisme ..., p. xxxi*

اقول لكن من قال أننا نتعارض بالإسلام ,الإسلام فى القلب والعقل معا ,لكن نحتج على دعوتهم للحكم بالإسلام .وهو شئ جد مختلف ,لأن الإسلام فى رأينا دين ليس دولة وضمير ليس سيفا

"*Para pendukung sekularisme berpendapat tentang pemisahan agama dan negara baik dalam bentuk yang menyeluruh dan sempurna (seperti negara Barat-terj), maupun dalam bentuk terbatas pada urusan politik dan hukum. Namun sebaliknya, para penentangnya berpendapat bahwa pemisahan merupakan hal yang mustahil dan integrasi keduanya adalah kewajiban dari agama. Islam adalah agama dan negara. Siapa saja yang menerima agama dan menolak negara Islam, maka sama saja mengingkari agama dengan jelas. Aku berpendapat, akan tetapi bagi orang yang berpendapat bahwa kami menentang Islam, Islam berada di dalam hati dan akal secara bersamaan, tetapi mengklaim bahwa hukum Islam mesti ditegakkan adalah dua hal yang berbeda, karena Islam adalah agama bukan negara, dan hati bukan pedang.*[36]

Setidaknya paradigma hubungan antara agama dan negara dalam wacana sekulerisme terbagi dua. Pertama, sekulerisme yang empati terhadap semua agama dan kehidupan beragama. Kedua,

[36] Alex Madani, *Studi Analisis Pandangan*..., p. 67

sekulerisme yang antipati atau curiga terhadap agama-agama dan aliran keagamaan. Namun negara pun bisa bersikap menolak terhadap agama-agama atau madzhab-madzhab diluar agama resmi negara. Di Saudi Arabia misalnya, negara melarang aliran-aliran tasawuf. Hal inipun dilakukan oleh negara sekuler semacam Turki.[37]

Namun sekulerisme yang menjadi paradigma Fouda adalah sekulerisme yang berempati terhadap agama. Karena terbukti dalam kehidupan sosial di Mesir Fouda tidak pernah mengkritisi ekspresi beragama dan praktek keagamaan yang dilakukan diruang publik (*public sphare*).

D. Karya-karya Farag Fouda

Pendirian Fouda dikemukakan dengan gamblang dalam serangkaian bab *Al-Haqiqah Al-Ghaibah*-nya. Ia memang bisa mengguncang sendi-sendi pemikiran kaum Islamis: mereka yang ingin menegakkan negara Islam berdasarkan ingatan tentang dunia Arab pada abad ke-7 ketika para sahabat Nabi memimpin umat. Bila kaum Islamis menggambarkan periode salaf itu sebagai zaman keemasan yang patut dirindukan, Fouda tidak. Baginya, periode itu zaman biasa, bahkan sebenarnya tidak banyak yang gemilang dari masa itu.

---

[37] Budhy Munawar Rachman, *Sekularisme ..., p. xxxi*

Sebagai seorang kolumnis dan penulis satir, tulisan Farag Fouda banyak dimuat pada majalah mingguan Mesir "*October"* dan majalah *Al-Ahrar.* Artikel-artikelnya di media massa bahkan telah dibukukan dengan judul *Faraj Fawdah wa-Ma'arikuhu al-Siyasiyyah (Compilation of Press Articles).*

Dalam bentuk buku, Fouda juga merupakan penulis yang cukup produktif. Karya pertamanya adalah *Al-Wafdu wa al-Mustaqbal*. Buku ini bercerita tentang keluarnya Fouda dari keanggotaan Partai Wafd dan mendirikan Partai Mustaqbal (The Future).

Ia meninggalkan beberapa buku yang kritis terhadap upaya politisasi Islam, antara lain *Qabla al-Suquth* yang berbicara tentang polemik formalisasi syariat Islam di Mesir, *al-Haqiqah al-Gha'ibah,* yaitu tinjauan kritis terhadap sejarah kelam kekhilafahan dalam Islam sejak zaman sahabat hingga daulah Abbasyah, dan *Hiwar Hawla `al-'Almaniyyah,* tentang polemik sekularisme di Mesir dan dunia Islam.

Selain itu, Fouda juga menulis *al-Mal'ub* (tentang bank syariah dan skandal pencucian uang), *an-Nazir* (tentang ekstremisme beragama), dan *al-Irhab* (tentang asal-usul pemikiran teroristik). Karya-karya lainnya adalah *Hatta la Yumkinu Kalaman fi al-Hawa, Zawaj al-Mut'ah, Nakun aw La Nakun.* Sementara itu, acara debat dalam rangka Pameran Buku Kairo pada bulan Januari 1992 yang juga diikuti oleh Farag Fouda dan

Muhammad Ahmad Khalafallah (lahir 1916) dari kubu sekuler, dan kubu yang lain terdiri dari Muhammad al-Ghazali (1917-1996), Ma'mun al-Hudaibi, dan Muhammad 'Imarah, juga dibukukan oleh Khalid Muhsin dengan judul *Misr baina al-Daulah al-Islamiyah wa al-Daulah al-Almaniyah.*

Sampai saat ini, buku-buku karya Fouda masih dilarang beredar di pasaran Mesir, dan hanya dapat dibaca sekelompok kecil orang saja. Hal ini tentu sangat mengkhawatirkan karena ketidakseimbangan informasi yang diterima akan berakibat pada penilaian subjektif dan berujung pada pengkafiran suatu pendapat.